



**PERUBAHAN RENCANA KERJA  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA KOTA BANDAR LAMPUNG  
TAHUN 2025**

**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
TAHUN 2025**

**GAMBARAN KESESUAIAN SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN  
PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH DENGAN  
PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017**

No	Sistematika		Hasil Pemeriksaan			
			Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
			Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1</b>	<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	√			
	1.1	Latar Belakang	√			
	1.2	Landasan Hukum	√			
	1.3	Maksud dan Tujuan	√			
	1.4	Sistematika Penulisan	√			
<b>2</b>	<b>BAB II</b>	<b>EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN</b>	√			
		Formulir E.81	√			
<b>3</b>	<b>BAB III</b>	<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	√			
		Tabel Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025	√			
<b>4</b>	<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	√			

Bandar Lampung, Juli 2025

Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Henny Maryuniwati, S.STP  
Pembina ( IV/a )  
Nip. 19830605 200112 2002

Diverifikasi :		Juli 2025	Tanda Tangan
1	<b>Dra. Rr. DIAH SULISTIORINI, M.Si.</b>		
	Kabid Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia Bapperida Kota Bandar Lampung		
2	<b>RENI MARITA SUDEMI, S.H., M.H.</b>		
	Fungsional Perencana Ahli Muda Bapperida Kota Bandar Lampung		

Mengetahui;  
Plt. Kepala Bapperida  
Kota Bandar Lampung,

Dini Purnamawaty, S.E., M.Si.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP.197002181993032002

**FORMULIR PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN  
PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH  
KOTA BANDAR LAMPUNG**

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I tahun berkenaan.	√			
4.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah sesuai surat edaran walikota.	√			
5.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan perubahan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah	√			
6.	Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah disahkan.		√	Belum sampai pada tahapan tersebut	

Bandar Lampung, Juli 2025

Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Henny Maryuniwati, S.STP  
Pembina (IV/a)  
Nip. 19830605 200112 2002

Diverifikasi : Juli 2025		Tanda Tangan
1	Dra. Rr. DIAH SULISTIORINI, M.Si.	
	Kabid Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia Bapperida Kota Bandar Lampung	
2	RENI MARITA SUDEMI, S.H., M.H.	
	Fungsional Perencana Ahli Muda Bapperida Kota Bandar Lampung	

Mengetahui;

Plt. Kepala Bapperida  
Kota Bandar Lampung,

Dini Purnamawaty, S.E., M.Si.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP 197002181993032002

**FORMULIR KESIMPULAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP  
KEBIJAKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH  
KOTA BANDAR LAMPUNG**

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Evaluasi RenjaPerangkat Daerah kabupaten/kota telah sampai dengan triwulan I tahun berkenaan berdasarkan realisasi DPA-Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Telah Sesuai
2.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, pencapaian sasaran pembangunan tahunan daerah serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	Telah Sesuai

Bandar Lampung, Juli 2025

Mengetahui;

Plt. Kepala Bapperida  
Kota Bandar Lampung,

Dini Purnamawaty, S.E., M.Si.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP 197002181993032002

Diverifikasi : Juli 2025		Tanda Tangan
1	<b>Dra. Rr. DIAH SULISTIORINI, M.Si.</b>	
	Kabid Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia Bapperida Kota Bandar Lampung	
2	<b>RENI MARITA SUDEMI, S.H., M.H.</b>	
	Fungsional Perencana Ahli Muda Bapperida Kota Bandar Lampung	

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita haturkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kesempatan kepada kami untuk dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung Tahun 2025 ini.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja adalah suatu keharusan bagi setiap Perangkat Daerah dalam rangka menindaklanjuti Perda Kota Bandar Lampung no.1 th 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 yang dituangkan dalam bentuk Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah pada satu tahun kedepan. Dalam penyelesaian Rencana Kerja ini telah disesuaikan dengan alur dan mekanisme yang telah ditetapkan sebagai panduan penulisan dan telah disinkronkan dengan arah kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kota Bandar Lampung.

Demikianlah sebagai pengantar dari kami, semoga dapat dipergunakan bagi pihak yang membutuhkan, terima kasih.

Bandar Lampung, Juli 2025

Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana



HENNY MARYUNIWATI, S.STP.  
NIP. 19830605 200112 200

**LAMPIRAN 16**  
**PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG**  
**NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG**  
**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH**  
**DAERAH TAHUN 2025**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 LATAR BELAKANG**

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksudkan untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Untuk setiap daerah (Kota/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPB), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dengan berlakunya Undang-undang ini maka terjadi perubahan pola perencanaan pembangunan daerah, dari sistem top-down (dari atas ke bawah) sekarang bottom-up (dari bawah ke atas). Artinya, di era Otonomi Daerah ini maka kepentingan masyarakatlah yang menjadi prioritas utama. Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Di dalamnya juga mengatur tentang peranan dan tanggungjawab Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah. Juga keterkaitan erat antara penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung menyusun perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yang berfungsi menerjemahkan, mengoperasionalkan RKPD ke dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah serta didalamnya memuat sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan, program-program pembangunan dan kegiatan pokok pembangunan dalam 1 (satu) tahun, sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD Kota Bandar Lampung.

Perubahan Renja Perangkat Daerah ini memuat rancangan kerangka ekonomi, program prioritas, rencana kerja dan pendanaannya serta perkiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, serta penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174);
  8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

- dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
  15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 3406 Tahun 2024;
  16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 559);
  17. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);
  18. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 2045 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 12);
  19. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);

20. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 15);
21. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 21).

### **I.3 Maksud dan Tujuan**

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 disusun untuk menyesuaikan program dan kegiatan yang tertuang pada RKPD Tahun 2025 sesuai Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025, yang otomatis akan merubah target kinerja yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 adalah :

- a. Sebagai acuan bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam merumuskan alokasi program dan kegiatan Perubahan pembangunan Tahun 2025;
- b. Menjadi pedoman dan dasar dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perubahan APBD Tahun 2025;
- c. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
- d. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Perangkat Daerah.

## **1.4 Sistematika Penulisan Rencana Kerja**

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung 2025 disusun sebagai berikut:

### **Bab I Pendahuluan**

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

### **Bab II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan I Tahun Berkenaan**

### **Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

### **Bab IV Penutup**

**BAB II**  
**EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN**  
**BERKENAAN**

**2.1 Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun berkenaan/Tahun 2025**

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Realisasi Anggaran Belanja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sampai dengan 28 Maret 2025 adalah sebesar Rp. 2.807.299.807 atau 12,45 persen dari dana yang tersedia dalam DPA sebesar Rp.22.551.084.344. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 disusun berdasarkan analisa kondisi objektif permasalahan pembangunan saat ini. Analisis kondisi objektif diharapkan dapat memberikan gambaran permasalahan yang masih dihadapi Perangkat Daerah. Gambaran permasalahan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang dihadapi Perangkat Daerah saat ini serta estimasi kondisi yang akan datang. Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat dijabarkan sebagai berikut :

**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA**

**A. KEGIATAN : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi  
Kinerja Perangkat Daerah**

- a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja . Realisasi anggaran sebesar Rp. 840.000 dan untuk kinerja sebesar 5 persen. SKPD

**B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- Realisasi anggaran sebesar Rp. 887.904.660 dan untuk kinerja sebesar 30 persen.
- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Realisasi anggaran sebesar Rp. 866.706.660 dan untuk kinerja sebesar 30 persen.
  - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD. Realisasi anggaran sebesar Rp. 21.198.000 dan untuk kinerja sebesar 15 persen.
  - c. Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD. Realisasi anggaran sebesar Rp. 0 dan untuk kinerja sebesar 0 persen.

**C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- Realisasi anggaran sebesar Rp. 0 dan untuk kinerja sebesar 0 persen.
- a. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi.

#### **D. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Realisasi anggaran sebesar Rp. 12.422.000 dan untuk kinerja sebesar 8 persen.

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  
Realisasi anggaran sebesar Rp. 0 dan untuk kinerja sebesar 60 persen.
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
Realisasi anggaran sebesar Rp. 0 dan untuk kinerja sebesar 0 persen.
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.  
Realisasi anggaran sebesar Rp. 1.874.000 dan untuk kinerja sebesar 50 persen.
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.  
Realisasi anggaran sebesar Rp. 9.888.000 dan untuk kinerja sebesar 99 persen.
- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.  
Realisasi anggaran sebesar Rp. 660.000 dan untuk kinerja sebesar 17 persen.
- f. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.  
Realisasi anggaran sebesar Rp. 0 dan untuk kinerja sebesar 0 persen.
- g. Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.  
Realisasi anggaran sebesar Rp. 0 dan untuk kinerja sebesar 0 persen.

#### **E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Realisasi anggaran sebesar Rp. 140.253.147 dan untuk kinerja sebesar 20 persen.

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Realisasi anggaran sebesar Rp. 14.253. 147 dan untuk kinerja sebesar 10 persen.

- b. Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor

Realisasi anggaran sebesar Rp. 126.000.000 dan untuk kinerja sebesar 20 persen.

#### **F. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Realisasi anggaran sebesar Rp.3.505.000 dan untuk kinerja sebesar 2 persen.

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. Realisasi anggaran sebesar Rp. 0 dan untuk kinerja sebesar 0 persen.
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Realisasi anggaran sebesar Rp. 0 dan untuk kinerja sebesar 0 persen.
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Realisasi anggaran sebesar Rp. 3.505.000 dan untuk kinerja sebesar 25 persen.

Pada program ini seluruh kegiatan telah terealisasi sehingga capaian kinerja mencapai **23.47** persen.

## **2. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**

**Kegiatan : Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** Realisasi anggaran sebesar Rp. 0 dan untuk kinerja sebesar 0 persen.

- a. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga  
Realisasi anggaran sebesar Rp.0 dan untuk kinerja sebesar 0 persen.
- b. Pemetaan kependudukan.  
Realisasi anggaran sebesar Rp. 0 dan untuk kinerja sebesar 0 persen.
- c. Penyusunan kajian dampak kependudukan.  
Realisasi anggaran sebesar Rp.0 dan untuk kinerja sebesar 0 persen.  
Pada program ini seluruh kegiatan telah terealisasi sehingga capaian kinerja mencapai **25** persen.

## **3. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA ( KB )**

**Kegiatan : Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal** Realisasi anggaran sebesar Rp. 1.085.125.000 dan untuk kinerja sebesar 10 persen.

- a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal.  
Realisasi anggaran sebesar Rp. 0 dan untuk kinerja sebesar 0 persen.
- b. Pengendalian Program KKBPK  
Realisasi anggaran sebesar Rp.3.625.000 dan untuk kinerja sebesar 10 persen.

**Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Realisasi anggaran sebesar Rp. 1.085.500 dan untuk kinerja sebesar 14 persen.**

- a. Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB.  
Realisasi anggaran sebesar Rp. 0 dan untuk kinerja sebesar 0 persen.
- b. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)  
Realisasi anggaran sebesar Rp.2.166.829.400 dan untuk kinerja sebesar 35 persen.

**Kegiatan Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat an obat kontrasepsi serta pelaksanaan KB di Daerah Kabupaten/Kota. Realisasi anggaran sebesar Rp. 0 dan untuk kinerja sebesar 0 persen.**

- a. Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB.  
Realisasi anggaran sebesar Rp. 0 untuk kinerja sebesar 0 persen.
- b. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya.  
Realisasi anggaran sebesar Rp. 0 dan untuk kinerja sebesar 0 persen.
- c. Dukungan operasional pelayanan KB Bergerak  
Realisasi anggaran sebesar Rp. 0 dan untuk kinerja sebesar 0 persen.

**Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB. Realisasi anggaran sebesar Rp. 0 dan untuk kinerja sebesar 0 persen.**

- a. Penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB Realisasi anggaran sebesar Rp. 0 dan untuk kinerja sebesar 0 persen.
- b. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas.  
Realisasi anggaran sebesar Rp.0 dan untuk kinerja sebesar 0 persen.

Pada program ini seluruh kegiatan telah terealisasi sehingga capaian kinerja mencapai **10.89** persen.

#### **4. PROGRAM KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA**

**Kegiatan : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**

**Realisasi anggaran sebesar Rp. 667.250.000 dan untuk kinerja sebesar 10 persen.**

- a. Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga). Realisasi anggaran sebesar Rp.674.250.000 dan untuk kinerja sebesar 15 persen.

b. Orientasi dan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKRBKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).

Realisasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000 dan untuk kinerja sebesar 20 persen.

c. Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) ( DAK NON FISIK ).

Realisasi anggaran sebesar Rp.0 dan untuk kinerja sebesar 0 persen

**Kegiatan : Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**

**Realisasi anggaran sebesar Rp.0 dan untuk kinerja sebesar 0 persen**

a. Pendayagunaan Mitra kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKRBKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Realisasi anggaran sebesar Rp. 0 dan untuk kinerja sebesar 0 persen.

b. Pelaksanakan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).

Realisasi anggaran sebesar Rp. 0 dan untuk kinerja sebesar 0 persen.

Pada program ini seluruh kegiatan telah terealisasi sehingga capaian kinerja mencapai **26.60** persen.

Matriks Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun berkenaan/Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.1









### **BAB III**

#### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Penyusunan program dan kegiatan yang ada berdasarkan Kepmendagri nomor 050-5889 tahun 2021 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

##### **A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

###### **Kabupaten/Kota**

Program ini dilaksanakan dengan indikator/ukuran keberhasilan yaitu Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang ditunjang dengan indikator kegiatan sebagai berikut :

###### **a. Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan,**

Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas. Adapun dokumen yang disusun adalah :

- Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang terdiri dari : Dokumen Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. ,Dokumen Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Tahun 2025 dan Perubahan RKA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025;
- Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah yang terdiri dari Dokumen Laporan Evaluasi Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024, Dokumen Laporan Evaluasi Renja Triwulanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025, Dokumen Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025; dan

- Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terdiri dari Dokumen LPJ Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024, Dokumen LPPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024.

### **B. Program Pengendalian Penduduk**

Program ini dilaksanakan dengan indikator/ukuran keberhasilan yaitu Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa/Kelurahan Setiap Tahun, yang ditunjang dengan indikator kegiatan sebagai berikut :

- a. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota,

Adapun dokumen yang disusun adalah :

- Dokumen Pemetaan Kependudukan Tahun 2025
- Dokumen Kajian Dampak Kependudukan Tahun 2025
- Dokumen Data dan Informasi Keluarga Tahun 2025

### **C. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA ( KB )**

Program ini dilaksanakan dengan indikator/ukuran keberhasilan yaitu Total Fertility Rate (TFR), Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need), Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR), Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi, yang ditunjang dengan indikator kegiatan sebagai berikut :

- Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal.
- Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB).
- Pengendalian dan pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
- Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

#### **D.PROGRAM KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN**

##### **KELUARGA**

Program ini dilaksanakan dengan indikator/ukuran keberhasilan yaitu Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita ( BKB ) yang ber KB, yang ditunjang dengan indikator kegiatan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
  - Terlaksananya kegiatan kelompok BKB.
- b. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
  - Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Tabel 3.1 rincian perubahan program,Kegiatan,Sub kegiatan, target dan pagu pada perubahan rencana kerja perangkat daerah tahun 2025

**TABEL 3.1**  
**RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025**  
**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**

NO	KODE			URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN		
				SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA														
				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA														
70	2	14	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	%	%	98	98	98	4.819.735.965,00	5.271.116.739,00	5.174.058.589,00			
	2	14	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	%	%	100	100	100	14.996.639,00	16.304.967,00	16.304.967,00		
	2	14	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	4	4	4	14.996.639,00	16.304.967,00	16.304.967,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	%	%	100	100	100	3.546.600.298,00	4.107.040.195,00	4.107.040.195,00		
	2	14	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	Orang/bulan	29	29	29	3.356.200.633,00	3.952.634.344,00	3.952.634.344,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1	1	1	182.950.872,00	147.196.520,00	147.196.520,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	7.448.793,00	7.209.331,00	7.209.331,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.09	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	%	80	80	80	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00		
	2	14	01	2.05	0005	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	29	29	29	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	%	%	98	98	98	252.389.028,00	261.081.577,00	153.718.427,00		
	2	14	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	4.878.514,00	5.058.807,00	5.058.807,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	54.474.722,00	54.158.472,00	46.795.322,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	4.996.629,00	3.742.821,00	3.742.821,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	1	1	1	109.439.169,00	110.000.000,00	10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
					SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	REPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2	14	01	2.06	0005	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	3.600.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	1	1	1	50.000.000,00	59.121.477,00	59.121.477,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	01	2.06		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	%	%	100	100	100	777.100.000,00	662.000.000,00	662.000.000,00	
2	14	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	12	12	12	201.100.000,00	158.000.000,00	158.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1	1	1	576.000.000,00	504.000.000,00	504.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Inventaris Kantor yang Terpelihara	%	%	98	98	98	213.650.000,00	209.690.000,00	219.995.000,00	
2	14	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajalnya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajalnya	Unit	Unit	1	1	1	46.000.000,00	45.430.000,00	45.430.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	3	3	3	155.000.000,00	149.680.000,00	159.985.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	5	5	5	12.650.000,00	14.580.000,00	14.580.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
71	2	14	02		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Calupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan setiap tahun	Calupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan setiap tahun	%	%	100	100	100	317.599.406,00	89.423.599,00	89.423.599,00	
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Calupan Daerah Kabupaten/Kota	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Calupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebutuhan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Calupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebutuhan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Calupan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	Kegiatan	3	3	3	317.599.406,00	89.423.599,00	89.423.599,00	
2	14	02	2.02	0005	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	29.999.922,00	29.636.042,00	29.636.042,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	02	2.02	0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Dokumen	Dokumen	1	1	1	257.599.736,00	29.914.725,00	29.914.725,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	02	2.02	0019	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Dokumen	Dokumen	1	1	1	29.999.748,00	29.872.832,00	29.872.832,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
72	2	14	03		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate (TFR)	%	%	2,21	2,21	2,21	8.735.751.833,00	9.879.065.430,00	11.056.280.460,00	
							Calupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	Calupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	%	%	0,25	0,25	0,25				
							Calupan Sasaran Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif	Calupan Sasaran Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif	%	%	67,60	67,60	67,60				
							Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	%	%	18,05	18,05	18,05				
							Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	%	%	66,01	66,01	66,01				
							Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	%	%	67,20	67,20	67,20				

NO	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN	
					SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kegiatan	Kegiatan	3	3	3	102.279.600,00	141.790.883,00	141.790.883,00	
	2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	Laporan	12	12	12	19.999.793,00	37.106.088,00	37.106.088,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	82.279.807,00	104.684.795,00	104.684.795,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Kebutuhan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Kebutuhan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kegiatan	Kegiatan	2	2	2	6.749.805.180,00	7.508.553.855,00	8.735.053.855,00	
	2	14	03	2.02	0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Unit	Unit	1	1	1	179.314.000,00	71.000.000,00	210.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	Orang	2900	2900	2900	6.570.491.180,00	7.437.553.855,00	8.525.053.855,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebutuhan Pengendalian dan Pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebutuhan Pengendalian dan Pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kabupaten/Kota	Laporan	Laporan	1	1	1	885.999.809,00	1.107.829.912,00	1.058.524.912,00	
	2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit	Unit	1	1	1	115.000.000,00	135.811.672,00	86.506.672,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	Laporan	12	12	12	672.339.809,00	888.498.240,00	888.498.240,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Laporan	Laporan	12	12	12	98.600.000,00	83.520.000,00	83.520.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Keterampilan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Keterampilan dan Kesejahteraan Keluarga	Kegiatan	Kegiatan	1	1	1	997.727.224,00	1.120.890.800,00	1.120.890.800,00	
	2	14	03	2.04	0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi	Organisasi	1	1	1	445.998.498,00	571.445.400,00	571.445.400,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kampung	Kampung	1	1	1	551.728.725,00	549.445.400,00	549.445.400,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN	
					SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025		
																		7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
73	2	14	04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang Ber-KB	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang Ber-KB	%	%	95	95	95	10.567.298.960,00	7.311.478.556,00	9.094.498.950,00		
	2	14	04	2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembinaan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembinaan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kegiatan	Kegiatan	2	2	2	10.480.049.454,00	7.236.234.366,00	9.000.494.366,00		
	2	14	04	2.01	0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Laporan	Laporan	3	3	3	15.999.497,00	20.691.945,00	20.691.945,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.01	0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Kelompok	Kelompok	716	716	716	5.065.999.957,00	2.656.354.202,00	3.731.364.202,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.01	0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	Kelompok	Kelompok	134	134	134	5.394.060.000,00	4.559.188.219,00	5.248.438.219,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kegiatan	Kegiatan	2	2	2	87.249.506,00	75.244.190,00	94.004.584,00		
	2	14	04	2.02	0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	Laporan	3	3	3	52.249.654,00	18.134.471,00	18.134.471,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.02	0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Organisasi	Organisasi	1	1	1	34.999.852,00	57.109.719,00	75.870.113,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		SATUAN		TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	RKPD TAHUN 2025	PENJABARAN APBD TAHUN 2025	RANCANGAN P RKPD TAHUN 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Pt, KEPALA DINAS  
Dinas Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana



(Henny Maryunwati, S.STP)  
NIP. 19830605 200112 2002

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Renja menjadi sangat penting artinya dalam menjawab berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat atau *Community Base Development* (CBD), melalui keterlibatan lebih banyak para pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya sampai kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Rencana Program dan Kegiatan Tahunan yang disusun sesuai dengan Tupoksi, Tujuan dan Sasaran yang mengacu pada Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029.

Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2026 yang diharapkan dapat memberikan umpan balik yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pimpinan dan jajaran pelaksana. Dengan demikian diharapkan akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

**WALI KOTA BANDAR LAMPUNG**

  
**EVA DWIANA**